

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir setiap Negara modern dewasa ini merupakan sistem demokrasi, meskipun pelaksanaan demokrasi untuk masing-masing Negara berbeda. Hal itu dimungkinkan karena adanya perbedaan sejarah bangsa, falsafah hidup dan tujuan yang dicapai. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia berbeda pula dengan demokrasi di Negara lain.

Dari masa ke masa Indonesia mengalami perubahan sistem demokrasi, dari masa demokrasi parlementer sampai dengan masa reformasi. Sistem demokrasi yang digunakan bangsa Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dengan rumusan lain Indonesia berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan bertujuan untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Mengingat aspirasi rakyat itu begitu kompleks dan dinamis maka selain penyaluran melalui mekanisme demokrasi secara melembaga, kreativitas rakyat itu juga disalurkan melalui forum-forum lain dalam bentuk diskusi-diskusi yang memungkinkan rakyat untuk mengekspresikan pendapatnya, bertukar pikiran, dan informasi.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari atas dua perkataan, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* yang berarti pemerintah. Maka dilihat dari arti katanya, istilah demokrasi adalah mengandung arti

pemerintahan rakyat, yang kemudian lebih dikenal dengan pengertian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government from the people, by the people, and for the people*)¹. Demokrasi merupakan proses panjang melalui pembiasaan, pembelajaran dan penghayatan. Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga Negara dan perangkat pendukungnya dan dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup (*way of life*) dalam kehidupan bernegara².

Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap demokrasi. Oleh sebab itu, harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik dibanding sistem lainnya. Di dalam Negara demokrasi adanya berbeda pendapat dianggap wajar dan harus tetap dihargai, sepanjang adanya perbedaan itu tidak membawa akibat negatif, berupa retaknya keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu kesadaran akan makna demokrasi dari waktu ke waktu senantiasa ditingkatkan, dengan memahami akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara dan warga masyarakat.

Dalam demokrasi terdapat beberapa aspek, salah satunya menyangkut dengan aspek nilai yang terkandung di dalam demokrasi itu sendiri yang lebih dikenal dengan sebutan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai demokrasi yang semestinya berkembang melalui nilai-nilai kesetaraan (*egalitarianisme*), keragaman (*pluralisme*), penghormatan atas perbedaan (*toleransi*), kemanusiaan atau penghargaan atas hak asasi manusia, kebebasan, tanggungjawab, kebersamaan dan sebagainya.

¹ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 81.

² Srijanti, A. Rahman, dan Purwanto, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 53.

Bangsa Indonesia saat ini pada era reformasi, sedang belajar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola sikap yang menjadi tuntunan atau nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Sikap demokrasi terkait dengan nilai-nilai demokrasi³. Sikap yang senantiasa bersandar pada nilai-nilai demokrasi akan membentuk budaya atau kultur demokrasi. Pemerintahan demokratis membutuhkan kultur demokrasi untuk membuatnya *performed* (eksis dan tegak). Sikap demokratis ada dalam manusia itu sendiri, baik selaku warga Negara maupun pejabat Negara. Nilai-nilai demokrasi itu seperti, kesadaran akan pluralisme, sikap yang jujur dan pikiran yang sehat, kerjasama dan sikap serta itikad baik, sikap kedewasaan dan membutuhkan pertimbangan moral⁴.

Untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi maka diperlukan proses pembelajaran melalui pendidikan. Melalui pendidikan, di dalamnya terdapat peran yang sangat penting dalam usaha meningkatkan sumberdaya manusia, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti di sekolah. Sekolah memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga Negara (siswa) yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu :

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

³ Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009) hal. 97.

⁴ Srijanti, A. Rahman, Purwanto. *Op. Cit*, hal 54.

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”⁵.

Pendidikan untuk menjadikan warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab adalah pendidikan demokrasi. Tujuan yang hendak dicapai melalui model pendidikan demokrasi adalah tumbuhnya kecerdasan warga sekolah, baik secara spiritual, emosional, sosial, rasa tanggung jawab, dan peran serta segenap komponen dunia persekolahan. Prinsip kebebasan berpendapat, kesamaan hak dan kewajiban, tumbuhnya semangat persaudaraan antara siswa dan guru. Interaksi guru dan siswa bukanlah hanya sebagai subyek–obyek, tetapi sebagai subyek–subyek yang sama–sama belajar membangun jati diri, karakter dan kepribadian.

Demokrasi merupakan salah satu materi yang dipelajari dalam bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia khususnya siswa sebagai generasi penerus bangsa. Kelas merupakan tempat yang strategis bagi guru dan murid untuk sama–sama belajar menegakkan nilai–nilai demokrasi. Dengan cara demikian, kelas akan menjadi magnet demokrasi yang mampu menggerakkan keinginan siswa untuk lebih mengenal nilai–nilai demokrasi dan keluhuran budi secara riil dalam kehidupan sehari–hari.

Siswa akan mempunyai sikap yang berbeda–beda mengenai bagaimana melaksanakan demokrasi, karena mereka mempunyai cara pandang tersendiri dalam menilai demokrasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sedikit banyak akan mempengaruhi sikap siswa terhadap pelaksanaan nilai–nilai demokrasi itu sendiri. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu dengan jelas dan secara

⁵ Winarno.*Ibid*.hal.114.

langsung apakah siswa tersebut sudah menerapkan demokrasi di dalam kehidupan sehari-hari yang sangat dekat dengan realita kehidupan.

Siswa kelas XI merupakan siswa yang banyak terlibat dalam kegiatan organisasi di lingkungan sekolah dibanding dengan siswa kelas X dan XII. Penanaman materi demokrasi ini biasanya melalui pembelajaran di kelas, atau kegiatan organisasi yang bertujuan mengajarkan kepada siswa untuk lebih demokratis. Berdasarkan pengamatan di lapangan siswa dapat mengimplementasikan demokrasi yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah seperti berpendapat, menghargai keberagaman, mengikuti pemilihan OSIS, dan lain sebagainya, banyaknya aktivitas yang dilakukan siswa di atas yang mencerminkan sikap demokratis yang memungkinkan siswa telah memahami nilai apa saja yang terdapat dalam demokrasi tersebut. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa tidak semua siswa memahami nilai demokrasi tersebut, seperti masih ada siswa yang mementingkan diri sendiri, berselisih dalam berpendapat, tidak mengikuti pemilihan OSIS dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti pemahaman materi demokrasi dengan sikap demokratis siswa di SMK F Bani Saleh Bekasi, sehingga diharapkan dengan mempelajari materi tentang demokrasi siswa dapat membekali untuk lebih memahami konsep dari demokrasi sehingga siswa menjadi warga Negara yang bersikap demokratis tidak hanya di lingkungan sekolah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di SMK F Bani Saleh?
2. Nilai-nilai demokrasi apa saja yang dapat mempengaruhi sikap demokratis siswa di SMK F Bani Saleh?
3. Bagaimana pemahaman siswa mengenai demokrasi dengan sikap demokratis siswa di SMK F Bani Saleh?
4. Apakah terdapat hubungan antara pemahaman materi demokrasi dengan sikap demokratis siswa di SMK F Bani Saleh?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi pada Apakah terdapat hubungan antara pemahaman materi demokrasi dengan sikap demokratis siswa di SMK F Bani Saleh Bekasi?

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut, Apakah terdapat hubungan antara pemahaman materi demokrasi dengan sikap demokratis siswa di SMK F Bani Saleh Bekasi?

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemahaman materi demokrasi yang dibatasi pada pemahaman nilai-nilai demokrasi yaitu, pemahaman seseorang tahu apa yang harus dilakukan terhadap apa yang diketahui yakni diantaranya

dapat menjelaskan, membedakan, memberi contoh, dan menyimpulkan nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi meliputi menghargai keberagaman, persamaan, kebebasan, keterbukaan dan musyawarah.

Sedangkan sikap demokratis siswa meliputi pengetahuan, perasaan, dan tingkahlaku (perilaku) siswa terhadap apa yang ada di lingkungan sekolah baik teman, guru dan peraturan-peraturan yang ada di sekolah.

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Peneliti

Peneliti berharap dapat menambah wawasan berfikir dan khasanah keilmuan terutama dalam dunia pendidikan.

2. Siswa

Penelitian ini juga dapat menambah wawasan bagi siswa agar dapat mengetahui pentingnya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatur sikap siswa menuju kehidupan yang demokratis.

3. Masyarakat

Penelitian ini juga dapat menambah wawasan masyarakat agar dapat menerapkan dan melaksanakan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

4. Kepustakaan

Menambah koleksi perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan perpustakaan jurusan Ilmu Sosial Politik serta sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang dapat menambah wawasan berfikir.